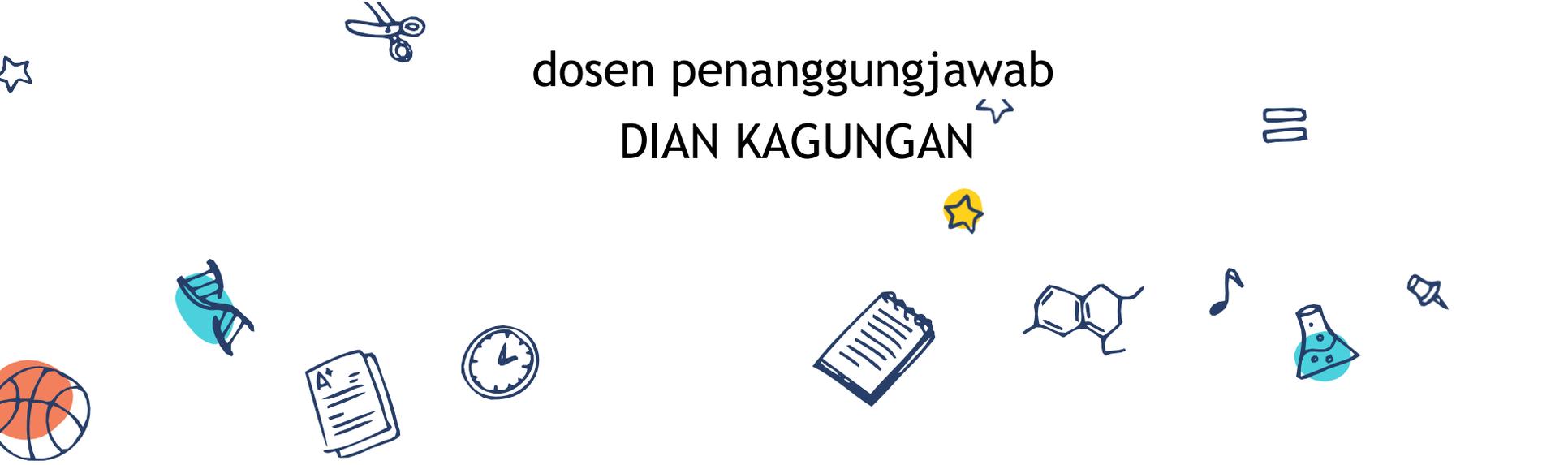


AASASASUMUM PEMERNTAHAN YANG BAIK

dosen penanggungjawab
DIAN KAGUNGAN



Pengertian AAUPB

Menurut Jazim Hamidi (Ridwan, 2010: 234)

- AAUPB merupakan nilai-nilai etika yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara;
- AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi tindakan administrasi negara dalam administrasi negara (yang berwujud penehapan / beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
- Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat;
- Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpengaruh dalam berbagai peraturan hukum positif. meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.



3



Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AAUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan jelas. Dapat dikatakan bahwa AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.

Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum

Berdasarkan pendapat **Van Wijfi/Williem Konjnenbelt** dan **Ten Berge** tersebut tampak bahwa kedudukan AAUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Sebenarnya menyamakan AAUPB dengan norma hukum tidak tertulis dapat menimbulkan salah faham, sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa antara "asas" dan "norma" itu terdapat perbedaan. Pada kenyataannya, AAUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau terwujud secara nyata dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi hukum.(4) Oleh karena itu Jazim Hamidi menyatakan bahwa sebagian AAUPB masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.

Fungsi dan arti penting AAUpb



Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan freies ermessen/ melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.



Fungsi dan arti penting AAUPB



Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.



Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN.



AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang



7





ASAS-ASAS Umum PEMERINTAHAN YANG BAIK di Indonesia



Pembagian AAUPB

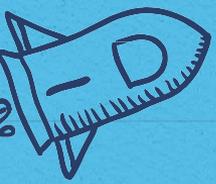
Bersifat formal atau prosedural

Prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuaian keputusan, atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan, yang menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat, dan asas permainan yang layak.

Bersifat material dan substansial

dari keputusan pemerintah, kelompok asas yang bersifat material atau substansial ini adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang-wenang, larangan penyalahgunaan kewenangan.





Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia



Macam-macam AAUPB

Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas keseimbangan
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan
- d. Asas bertindak cermat
- e. Asas motivasi untuk setiap pengurusan
- f. Asas tidak mencampuradukan kewenangan
- g. Asas permainan yang layak
- h. Asas keadilan dan kewajaran
- i. Asas kepercayaan dan menggapai pengharapan yang wajar
- j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
- k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi
- l. Asas kebijaksanaan



CONTOH KASUS AAUPB

Pengusuran Kampung Pulo Sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Permohonan kasasi warga Kampung Pulo diolok Mahkamah Agung (MA). MA menegaskan relokasi lahan dan pemulihan kembali jalur sungai sudah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

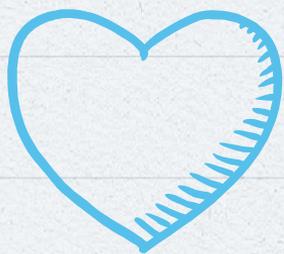
Warga menggugat surat peringatan ketiga pada 6 Agustus 2015 tentang perintah pengosongan rumah. Menurut MA, proses yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Pemko Jakim dan Saipol PP, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujar majelis kasasi sebagaimana dilansir website MA, Senin (6/3/2017).

Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Yulias, dengan anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin. Menurut MA, pengujian terhadap objek sengketa tidak lagi relevan karena pembongkaran telah dilaksanakan.

"Bahwa kritik beraikan para pihak adalah berkenaan dengan ganti rugi dan kesalahan tindakan pemerintah yang masih dapat diselesaikan melalui jalan lain (lembaga peradilan yang berwenang untuk itu)," putus majelis pada 13 Desember 2016.

Lalu, apa itu AUPB/Algemene Beginzeden van Behoulijk Beslores/General Principle Of Good Administration? Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) diatur dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Pemerintahan Daerah, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara.



THANKS!

Any questions?